

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian akuntansi. Menurut Kieso, et al. (2016:2) pengertian akuntansi adalah:

“Accounting consist of the three basic activities —it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.

Penjelasan di atas dapat diartikan Akuntansi terdiri atas tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut

untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) pengertian akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut Rizal Effendi. (2013:1)

”akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan”.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta penganturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) jenis-jenis bidang akuntansi, sebagai berikut:

1. **Akuntansi Manajemen**, yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.
2. **Akuntansi Biaya**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. **Akuntansi Keuangan**, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan segala keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan memiliki fungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan.
4. **Auditing**, yaitu bidang akuntansi yang memiliki fungsi utama adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai *internal auditor*. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor *independen* atau akuntan publik.
5. **Akuntansi Pajak**, yaitu bidang akuntansi yang memiliki fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas penghitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. **Sistem Akuntansi**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesain dan mengimplementasikan periode serta pengamanan data keuangan pada perusahaan. Tujuan utamanya adalah dari setiap aktivitas bidang ini yaitu mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.

7. **Akuntansi anggaran**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping itu juga menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
8. **Akuntansi internasional**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di masa perusahaan multinasional beroperasi.
9. **Akuntansi sektor publik**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo dan sebagainya.

2.1.2 Ruang Lingkup Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Perpajakan

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut P.J.A Adriani dalam Sukrisno Agoes (2014 : 6) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014 : 1) adalah :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Berdasarkan pengertian di atas maka Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Erly Suandy (2014 : 10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi adalah sebagai berikut :

1. “Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.”

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014 : 3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
2. Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
3. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
4. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :
 - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
 - 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.2.3 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes (2014 : 10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut :

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Adapun Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2014 : 35) adalah sebagai berikut :

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.2.4 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014 : 11)

adalah sebagai berikut :

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.”

2.1.3 Teori Keagenan (*Agency Theori*)

Terdapat beberapa konsep mengenai teori keagenan. Salah satu konsep teori keagenan menurut Lukas Setia Atmaja (2008:12) :

“Hubungan keagenan atau *agency relationship* muncul ketika satu atau lebih individu (majikan) menggaji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat

keputusan kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan ini muncul antara : (1) pemegang saham (*shareholders*) dengan para manajer, serta (2) *shareholders* dengan kreditor (*bondholders* atau pemegang obligasi).”

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah :

“Hubungan atau kontak antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, dan CEO (*Chief Excecutive Officer*) sebagai agent mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.”

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*).

Dari uraian di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa teori keagenan merupakan kontrak antara manajer dengan pemegang saham, dimana pemegang saham mempekerjakan manajer sebagai agent untuk bertindak mewakili kepentingan pemegang saham.

2.1.4 Aktiva Pajak Tangguhan

2.1.4.1 Pengertian Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang

dapat dikompensasi pada periode mendatang menurut PSAK No.46 (IAI, 2010).

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan *temporer* (waktu) antara standar akuntansi dan perpajakan dalam pengakuan pendapatan dan beban yang sifatnya sementara, serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang. Dampak PPh di masa yang akan datang tersebut harus diakui, dihitung, disajikan, serta diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi komprehensif. Di dalam PSAK No. 46, diatur mengenai pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai kewajiban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan. Jika laba akuntansi lebih besar dari pada laba pajak maka akan terbentuk kewajiban pajak tangguhan, sebaliknya bila laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak maka akan terbentuk aset pajak tangguhan. Pajak tangguhan tidak bisa dihindari dan muncul sebagai akibat adanya dua pendekatan yang harus dijalani dalam menghitung beban pajak. Pajak tangguhan dalam bentuk aset/manfaat membuat wajib pajak mengetahui bahwa seharusnya nilai beban pajak yang harus dibayar dapat dipulihkan pada masa mendatang sedangkan pajak tangguhan dalam bentuk kewajiban menimbulkan adanya beban pajak yang akan terutang pada masa yang akan datang. Sehingga besarnya laba kena pajak dipengaruhi juga oleh besaran beban pajak tangguhan tahun berjalan.

Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan Aktiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Asset*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.
2. Sisa kompensasi kerugian.

Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa:

- a. perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*); atau
- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (PSAK No. 46).

2.1.4.2 Pengertian Aktiva Pajak Tangguhan

Pengertian Aktiva Pajak Tangguhan yang dikemukakan oleh Waluyo (2012:217) adalah sebagai berikut :

“Aktiva yang terjadi apabila ada perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak.”

Menurut Plesko dalam Phillips (2003):

“Bahwa perbedaan temporer dapat timbul dari perbedaan aturan pelaporan masing-masing sistem, tetapi dapat juga karena GAAP (di Indonesia dikenal dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum) memberikan kebebasan yang lebih besar pada manajer dalam menentukan jumlah pendapatan dan beban untuk masing-masing periode dibandingkan dengan aturan perpajakan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007), nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai.

Dengan adanya kewajiban untuk melakukan peninjauan kembali pada tanggal neraca, maka setiap tahun manajemen harus membuat suatu penilaian untuk menentukan saldo aktiva pajak tangguhan dan pencadangan aktiva pajak tangguhan, sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan aktiva pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif.

Dengan diberlakukannya PSAK 46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aktiva pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aktiva pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba.

2.1.4.3 Indikator Perhitungan Aktiva Pajak Tangguhan

Aktiva Pajak Tangguhan merupakan manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang (Waluyo, 2008:217).

Dalam penelitian ini Aktiva Pajak Tangguhan dinyatakan dengan perubahan nilai aktiva pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

$$APT_{it} = \frac{\Delta \text{Aktiva Pajak Tangguhan}_{it}}{\text{Aktiva Pajak Tangguhan}_t}$$

Menurut Waluyo (202:217) definisi Aktiva Paajak Tangguhan, yaitu:

“Aktiva yang terjadi apabila adanya perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-undang pajak.”

$$CAPT_{it} = \frac{\Delta \text{Aktiva Pajak Tangguhan}_{it}}{\text{Aktiva Pajak Tangguhan}_t}$$

2.1.5 *Leverage*

2.1.5.1 Pengetian *Leverage*

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari pasti membutuhkan modal. Modal tersebut berasal dari modal sendiri maupun modal yang berasal dari pinjaman. Perusahaan yang menggunakan sumber dana dari luar untuk membiayai operasional perusahaan baik yang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang merupakan penerapan dari kebijakan *leverage*.

Istilah *leverage* biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Dengan memperbesar tingkat *leverage* maka hal ini menggambarkan tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga akan memperoleh jumlah return yang akan diperoleh. Semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi

resiko yang dihadapi serta semakin besar tingkat *return* atau penghasilan yang diharapkan.

Menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2011:238) *leverage* adalah:

“Ratio that measures the extent to which the company's have been financed by the use of debt”.

Menurut Keiso, Weygant, dan Warfield (2014:213) rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

“Ratio leverage is rasio that measures of degree of protection for longterm creditors and investors”.

Menurut Harahap (2015:306) mendefinisikan *leverage* sebagai berikut:

“Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas. Setiap penggunaan utang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio dan pengembalian. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa resiko keuangan perusahaan”.

Kasmir (2013:151) menyatakan rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

“Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivitya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Irham Fahmi (2012:127) mendefinisikan ratio *leverage* sebagai berikut:

“Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya yang membandingkan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut Kasmir (2013:153), terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage*, yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:154) adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

2.1.5.3 Jenis-jenis Pengukuran Rasio *Leverage*

Berikut ini merupakan jenis-jenis rasio yang termasuk dalam rasio *leverage* menurut Agus Sartono (2015:121) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Debt ratio*

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{total utang}}{\text{Total aktiva}}$$

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi.

2. *Debt to Equity Ratio*

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{total utang}}{\text{Total modal sendiri}}$$

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva.

3. *Times Interest Earned Ratio*

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{beban bunga}}$$

Time interest earned ratio, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba

dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga.

4. *Fixed charge coverage*

$$\text{Fixed charge coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{bunga} + \text{pembayaran sewa}}{\text{bunga} + \text{pembayaran sewa}}$$

Fixed charge coverage ratio, mengukur berupa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran, sewa, dan pinjaman. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivitya dari perusahaan lising dan harus membayar angsuran tertentu.

5. *Debt service coverage*

Debt service coverage = laba sebelum bunga dan pajak

$$\frac{\text{Bunga} + \text{sewa} + \frac{\text{angsuran pokok pinjaman}}{(1 - \text{tarif pajak})}}{\text{Bunga} + \text{sewa} + \frac{\text{angsuran pokok pinjaman}}{(1 - \text{tarif pajak})}}$$

Debt service coverage, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman.

Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan proksi *Debt to Total Assets Ratio* atau *Debt Ratio* (DAR).

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

2.1.5.4 *Debt to Asset Ratio*

Menurut Kasmir (2014:156), *Debt Ratio/debt to asset ratio* merupakan:

“... rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”.

Menurut Hery (2015:195) *debt to asset ratio* adalah:

“rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset.”

Menurut Agus Sartono (2015:121) menyatakan bahwa *debt ratio* atau *debt to asset ratio* merupakan:

“Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi”

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa *debt to asset ratio / debt ratio* adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.

2.1.6 Manajemen Laba

2.1.6.1 Pengertian Manajemen Laba

Ada beberapa definisi yang berbeda dari satu dengan yang lain antara lain: definisi manajemen laba yang diciptakan oleh *National Association of Fraud Examiners*, *Fisher dan Resenzweig*, *Lewitt*, serta *Healy dan Wahlen* dalam (Sulistyanto 2008:49).

Menurut *National Association of Certified Fraud Examiners* dalam Sulistyanto (2008:49):

“Earnings management is the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgement or decision.”

Menurut Fisher dan Rosenzweig dalam Sulistyanto (2008:49):

“Earnings management is a actions of a manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) in long-term economic profitability of the unit.”

Menurut Lewitt dalam Sulistyanto (2008:50):

“Management Laba is flexibility in accounting allows it to keep pace with business innovations. Abuses such as earnings occur when people exploit this pliacy. Trickey is employed to obscure actual financial volatility. This in turn, make the true consequences of management decisions”.

Menurut Ahmed Riahi dan Belkaoui yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto dan Risnawati Dermauli (2006:74) manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Manajemen laba sebagai kemampuan untuk “memanipulasi: pilihanpilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan”

Mulford Charles W & Eugene E.Comiskey yang dialih bahasakan oleh Aurolla Saparani Harapap (2010:81) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari sebenarnya”.

Menurut Fahmi (2011:321) manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Earnings management (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan

earnings management sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya”.

Manajemen laba menurut Scott, dalam Muid, (2005) adalah”

“Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses menyusun pelaporan keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi. Manajemen laba dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelonggaran penggunaan metode dan prosedur akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan (*discretionary*) yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan.”

Secara umum terdapat beberapa definisi mengenai manajemen laba.

Pengertian manajemen laba menurut Scott (2009:403) :

“Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka. Dimana manajemen laba menghasilkan pelaporan keuangan yang tidak netral yang didalamnya manajer secara intensif melakukan campur tangan untuk menghasilkan beberapa keuntungan pribadi.”

Sedangkan menurut Schipper dalam Sri Sulistyanto (2008) menyebutkan bahwa:

“Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses).”

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah proses campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan yang menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau meningkatkan nilai pasar perusahaan. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer dengan cara memanipulasi data atau

informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan untuk memperoleh tujuan tertentu.

2.1.6.2 Strategi Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2012:27) manajemen laba dapat dibagi menjadi empat bentuk yaitu:

1. *Income Minimization*
Manajemen laba ini dilakukan pada saat perusahaan mempunyai keuntungan yang tinggi dan tujuan perusahaan adalah untuk menghindari atau meminimalisasi pajak.
2. *Income Maximization*
Pola ini dilakukan saat manajemen berusaha meningkatkan pendapatan dengan melaporkan laba bersih yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar, yaitu dengan cara mengakui pendapatan periode berikutnya ke periode sekarang atau mengakui beban periode sekarang ke periode mendatang.
3. *Taking Bath*
Pola ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan mengalami tekanan atau restrukturisasi, yaitu dengan mengakui biaya yang sebenarnya baru terjadi di periode yang akan datang ke periode sekarang. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat keuntungan yang tinggi pada periode mendatang.
4. *Income smoothing*
Manajemen memiliki insentif untuk melakukan perataan penghasilan untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil.

2.1.6.3 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2012:63) mengemukakan terdapat terjadinya motivasi manajemen laba sebagai berikut:

1. *Bonus Scheme Hypothesis*
Kompensasi (bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang

meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai target laba minimal tertentu dan bonus maksimal dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.

2. *Contracting Incentive*
Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditur dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atas laporan ekuitas berada di bawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bagi kreditur, karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.
3. *Political Motivation*
laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.
4. *Tax Motivation*
Perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak.
5. *Incentive Chief Executive Officer (CEO)*
CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
6. *Initial Public Offering (IPO)*
Perusahaan yang akan go publik belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go publik melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

2.1.6.4 Pola dan Teknik Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2012:37) teknik manajemen laba dapat juga dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi
Permainan manejerial ini biasa dilakukan dengan meninjau kembali

dan mengubah berbagai estimasi akuntansi yang selama ini telah digunakan perusahaan. Sebagai contoh adalah umur ekonomis aktiva tetap (tangible assets) dan aktiva tidak berwujud (intangible assets), prosentase biaya kerugian piutang, dan lain-lain.

2. Mengubah atau mengganti metode akuntansi Manajer mempunyai kebebasan untuk mengubah atau mengganti metode akuntansi yang selama ini dipakainya dengan metode akuntansi lain. Hal inilah yang mendorong atau memotivasi seorang menejer untuk mengoptimalkan kepentingan dan kesejahteraan pribadi. Seorang menejer hanya mau menggunakan suatu metode akuntansi tertentu apabila ada manfaat yang bias diperoleh.
3. Permasalahan cadangan Cadangan (reserves) merupakan laba yang ditarik ke belakang dari periode pengakuan sesungguhnya dan menggunakan pada saat dibutuhkan. Sebagai contoh adalah cadangan kerugian piutang, penurunan nilai persediaan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan perusahaan dengan tujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, pada saat menginginkan labanya menjadi lebih tinggi maka perusahaan dapat menggunakan cadangan itu untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya itu.

Menurut Sulistyanto (2008:177) pola manajemen laba antara lain:

- a. Penaikkan laba (*income increasing*)

Penaikkan laba (*income increasing*) adalah upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya

- b. Penurunan laba (*income decreasing*)

Penurunan laba (*income decreasing*) adalah upaya perusahaan mengatur laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih

rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.

c. Perataan laba (*income smoothing*)

Perataan laba (*income smoothing*) adalah upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.

Menurut Mulford Charles W & Eugene E. Comiskey yang dialihbahasakan Aurolla Saparani Harahap oleh (2010:88) teknik atau tindakan manajemen laba meliputi:

1. Mengubah metode depresiasi (misal dari metode dipercepat menjadi metode garis lurus).
2. Mengubah umur harta – untuk menghitung depresiasi
3. Mengubah nilai sisa harta – untuk menghitung depresiasi
4. Menetapkan cadangan/ penyisihan piutang tak tertagih
5. Menetapkan cadangan/ penyisihan kewajiban warranty (jaminan)
6. Menentukan penilaian atas cadangan pajak tangguhan
7. Menentukan adanya kerusakan harta atau kerugian
8. Mengestimasi tahapan penyelesaian dari kontrak (dengan) metode persentase – penyelesaian
9. Mengestimasi realisasi atas klaim kontrak
10. Mengestimasi penghapusan atas investasi tertentu
11. Mengestimasi biaya restrukturisasi yang ditangguhkan
12. Mempertimbangkan perlunya dan jumlah persediaan yang dihapus
13. Mengestimasi kewajiban dampak lingkungan yang ditangguhkan
14. Membuat atau mengubah asumsi aktuarial pension
15. Menentukan besarnya harga transaksi pembelian (akuisisi) yang dialokasikan ke perolehan R&D dalam proses
16. Menentukan atau mengubah umur amortisasi harta tak berwujud
17. Memutuskan umur kapitalisasi dari berbagai biaya seperti: pengembangan urukan tanah, advertensi tanggap langsung, dan pengembangan piranti lunak

18. Menentukan klasifikasi lindung nilai yang memadai untuk suatu derivative keuangan
19. Menetapkan apakah suatu investasi memperbolehkan tindakan mempengaruhi perusahaan investee (anak perusahaan)
20. Memutuskan apakah penurunan nilai pasar suatu investasi bukanlah temporer.

Menurut Sulistyanto (2008:34) ada empat cara yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih
2. Mengakui pendapatan lebih lambat satu periode atau lebih
3. Mencatat pendapatan palsu
4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat

2.1.6.5 Indikator Manajemen Laba

Sulistyanto, 2012:161 menyebutkan Manajemen Laba adalah :

“Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan.”

Menurut Sulistyanto, 2012:163 Langkah awal untuk mengidentifikasi manajemen laba adalah:

“Langkah awal untuk mengidentifikasi manajemen laba adalah dengan mengeluarkan komponen kas dari model akuntansi berbasis akrual untuk menghitung dan menentukan besarnya komponen akrual yang diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu. Untuk itu laba akuntansi di atas harus dikurangi dengan arus kas yang diperoleh dari operasi perusahaan (*Cash flow from operation*) selama periode bersangkutan.”

Menurut Sulistyanto, 2012:164 Setelah berhasil menentukan besarnya komponen akrual yang diperoleh perusahaan selama satu periode, maka langkah kedua adalah

“Memisahkan komponen akrual itu menjadi dua komponen utama, yaitu *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Sementara itu, *nondiscretionary accruals* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum.”

Untuk mendeteksi apakah perusahaan melakukan manajemen laba dalam laporan keuangannya digunakan rumus total *accruals*. Aharony (Scott, 1997) dalam Muid (2005) menerjemahkannya ke dalam persamaan:

Keterangan:

TAC it = Total *Accruals* periode tes

NOI it = *Net Operating Income* periode tes

CFFO it = *Cash Flow From Operations* periode tes

Menurut Healy dan De Angelo (Scott, 1997) dalam Muid (2005), total *accruals* terdiri dari *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals*. Total *accruals* digunakan sebagai indikator, sebab *discretionary accruals* (DAC) sulit untuk diamati, karena ditentukan oleh kebijakan masing-masing manajer.

Friedlan dalam Muid (2005) merumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

Keterangan:

DAC it = *Discretionary accrual* periode tes

TA it = Total *Accruals* periode tes

Sales it = Penjualan periode tes

TA t-1 = Total *Accruals* periode dasar

Sales t-1 = Penjualan periode dasar

2.2 Kerangka Pemikiran

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sering direkayasa oleh pihak manajemen untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan juga untuk kepentingan dirinya sendiri atau dikenal dengan manajemen laba. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menguji manajemen laba dan biasanya manajemen laba sering sekali dikaitkan dengan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan.

karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan. Begitupun dengan aktiva pajak tangguhan dan *leverage* merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Plesko (2002) dalam Phillips et al. (2003) mengungkapkan bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen.

Artinya, semakin besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam *leverage* dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. Serta semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin

tinggi pula kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai *leverage* (Phillips et al., 2003).

2.2.1 Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Suranggane (2007:78) menyatakan “Semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba Komersial) dengan laba fiskal menunjukkan bendera merah bagi laporan keuangan”. Aktiva Pajak Tangguhan terjadi apabila laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi dari laba fiskal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang.

Suranggane (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa aktiva pajak tangguhan dijadikan proyeksi sebagai indikator dari praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Aktiva pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan minimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspetasikan adanya peranan antara aktiva pajak tangguhan yang dapat dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba.

2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Laba

Tingkat *leverage* merupakan salah satu hal yang dapat memotivasi manajemen dalam penerapan manajemen laba. Perusahaan yang memiliki tingkat

leverage yang tinggi menggambarkan bahwa liabilitas yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan dengan asset yang dimiliki perusahaan, hal ini mengakibatkan risiko dan tekanan yang besar pada perusahaan. Semakin tinggi tingkat rasio *leverage* suatu perusahaan akan berdampak pada semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapi perusahaan tersebut. Investor akan lebih memilih perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang lebih rendah.

Hubungan *leverage* terhadap manajemen laba menurut Sri Sulistyanto (2012:63) menyatakan bahwa:

“Praktik perataan laba yang merupakan salah satu bentuk manajemen laba sering dilakukan oleh perusahaan ketika mereka menghadapi paksaan dari kreditor dengan cara mengubah metode akuntansinya. Semakin besarnya rasio *leverage* mengakibatkan resiko yang ditanggung oleh pemilik modal juga akan semakin meningkat”.

Adapun hubungan *leverage* terhadap manajemen laba menurut Saptantinah (2005) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi berarti memiliki proporsi utang yang lebih besar dibandingkan dengan proporsi aktiva yang dimiliki sehingga akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba untuk menghindari perjanjian utang”.

Dalam penelitian Subhan (2011) menyatakan:

“Perusahaan yang terancam melanggar perjanjian utang cenderung melakukan manajemen laba dengan menaikkan laba dalam rangka memperbaiki posisi saat negosiasi ulang atau sebagai upaya melakukan go public untuk mendapatkan dana segar karena kesulitan untuk mencair dana pinjaman”.

Sedangkan menurut Yamaditya (2014) menyatakan bahwa:

“*Leverage* mempunyai hubungan dengan praktek manajemen laba, ketika perusahaan mempunyai rasio *leverage* yang tinggi maka perusahaan cenderung akan melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan membayar hutangnya tepat waktu”.

Hasil penelitian yang dilakukan Wijaya dan Christiawan (2014) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal yang sama pula dikemukakan oleh hasil penelitian Wibisana dan Ratnaningsih (2014), Yatulhusna (2015) dan Sosiawan (2012).

2.2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen laba, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

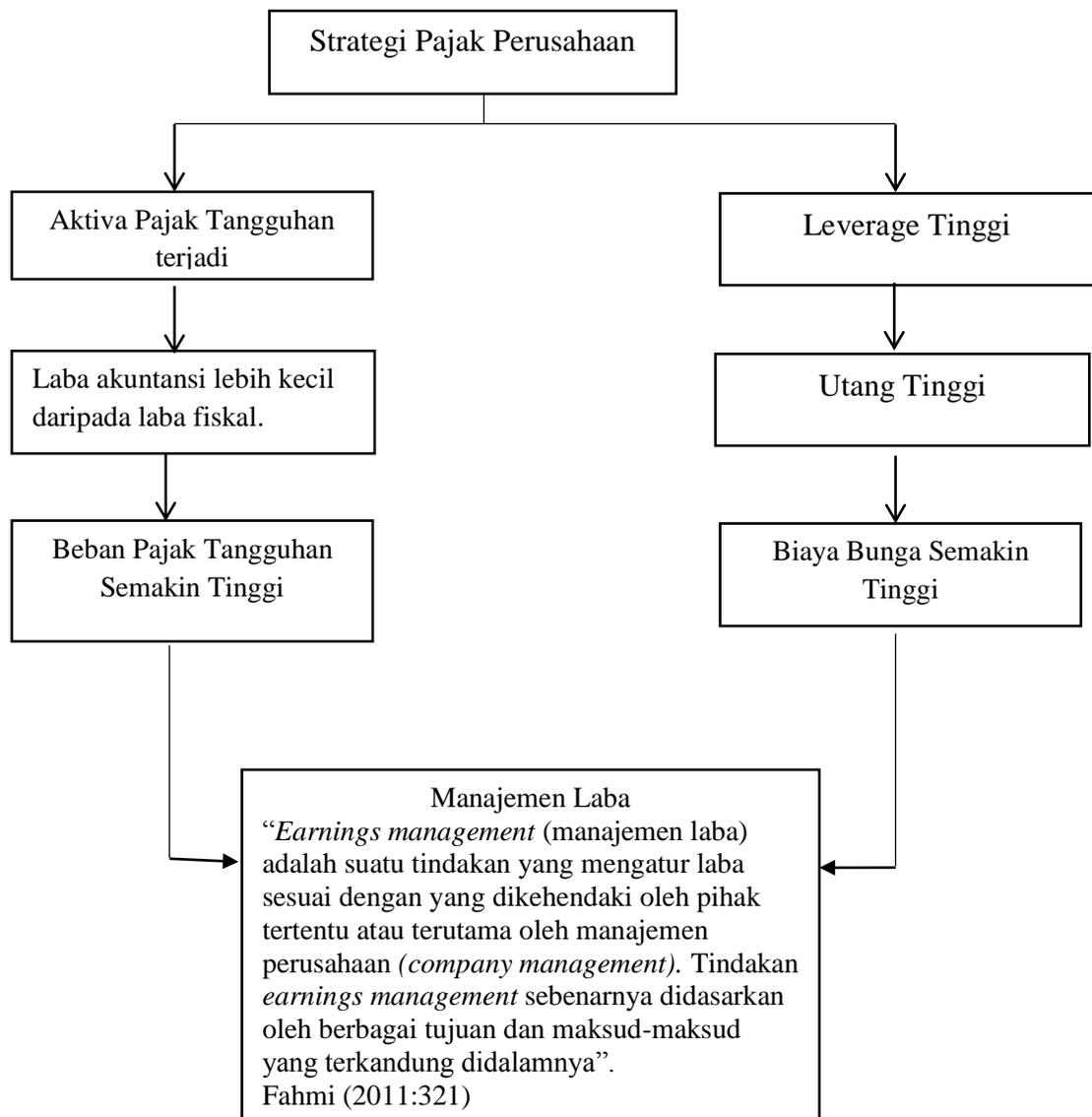
No	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan
1	Yulianti	2005	Kemampuan Pajak Tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba	Perbedaanya terdapat pada kriteria pemilihan sampel, perusahaan pada penelitian Yulianti hanya perusahaan yang berada di sekitar

				<i>earnings threshold.</i>
2	Zulaikha Suranggane	2007	Analisis Aktiva Pajak Tangguhan dan AkruaI Sebagai Predikator Manajemen Laba	Perbedaannya terdapat pada kriteria pemilihan sampel, perusahaan pada penelitian Suranggane meneliti yang bergerak pada sektor manufaktur sedangkan penulis menggunakan perusahaan yang bergerak di sektor otomotif
3	Dini Onasis	2016	Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Perbedaannya terdapa pada sampel penelitian, perusahaan pada penelitian Dini meneliti yang bergerak pada sektor manufaktur sedangkan penulis menggunakan perusahaan yang bergerak pada sektor otomotif
4	Sosiawan	2012	Pengaruh Kompensasi, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan, Earnings Power terhadap	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kompensasi dan ukuran perusahaan tidak

			Manajemen Laba	berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan <i>leverage</i> dan <i>earning power</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
5	Wijaya dan Christiawan	2014	Pengaruh Kompensasi Bonus, <i>Leverage</i> , dan Pajak terhadap Manajemen Laba	Bonus tidak berpengaruh signifikan sedangkan <i>Leverage</i> dan Pajak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba
6	Yatulhusna	2015	Pengaruh <i>Leverage</i> , Umur dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>leverage</i> , dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

7	Ketut Gunawan, I Nyoman Ari Surya Darmawan, I Gusti Ayu Purnamawati	2015	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
---	---	------	---	---

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh akitva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba secara keseluruhan. Maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba.

H2: Terdapat Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Laba.